

# Analisis Kebijakan Luar Negeri Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Perspektif Realisme

Laily Dewi Indah Sari<sup>a</sup>

<sup>a</sup>email: [lailydewi7@gmail.com](mailto:lailydewi7@gmail.com)

## ABSTRACT

*Illegal fishing is used in international sea lanes having the interests of the ASEAN region, having marine wealth and waters in trade lanes. Illegal fishing is used to protect marine areas from maritime boundary disputes. The act of illegal fishing is contrary to national regulations in Indonesian waters. The purpose of this study is to determine the application of maritime policy to policy in Indonesia. The focus of this research is foreign policy against illegal fishing based on the perspective of realism. Data collection techniques obtained literature review studies on literature studies from various kinds of documents that support the research theme, namely books, journals, articles and websites. Technical data analysis consists of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the realism perspective provides a view of human nature in a life with a policy in sinking foreign ships to the Indonesian government. Therefore, a policy of sinking foreign ships is needed in order to achieve interests in maintaining national security in a region.*

*Keywords: Illegal Fishing, Foreign Policy, Realism Perspective*

## ABSTRAK

Illegal fishing digunakan pada jalur laut internasional memiliki kepentingan wilayah ASEAN, memiliki kekayaan laut dan perairan pada jalur perdagangan. Illegal fishing digunakan untuk melindungi wilayah laut dari sengketa batas maritim. Tindakan illegal fishing bertentangan dengan aturan nasional pada perairan negara Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan maritime pada kebijakan di Indonesia. Fokus Penelitian ini adalah kebijakan luar negeri terhadap illegal fishing berdasarkan perspektif realisme. Teknik pengumpulan data diperoleh studi literatur review pada studi kepustakaan dari berbagai macam dokumen yang mendukung dengan tema penelitian yaitu buku, jurnal, artikel dan website. Teknis analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif realisme memberikan pandangan mengenai sifat dasar manusia pada suatu kehidupan dengan kebijakan dalam menenggelamkan kapal asing kepada pihak pemerintah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan penenggelaman kapal asing demi tercapainya kepentingan dalam menjaga keamanan nasional di suatu wilayahnya.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Kebijakan Luar Negeri, Perspektif Realisme

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang menyebabkan perlunya pengamanan yang ketat sehingga dapat menjaga perairan yang ada di negara Indonesia (Elnizar, 2017). Kekayaan laut yang dimiliki negara Indonesia memiliki resiko tinggi terhadap eksploitasi pada negara lain (Dugis, 2018). Salah satunya kebijakan dalam menenggelamkan kapal asing dalam mencuri ikan. Kebijakan tersebut dapat membentuk berbagai upaya sehingga dapat mengusahakan pemerintah Indonesia menjaga keamanan pada wilayah perairan Indonesia. Ilmu hubungan internasional diberikan ketersediaan dan klasifikasi pada orientasi negara dijadikan sebagai alternatif yang menghadapi perubahan dinamika secara umum (Dugis, 2018). Orientasi

dibidang politik berkaitan dengan instrument dan domestik dalam memenuhi kebutuhan setiap negara (Elnizar, 2017). Pada perspektif realisme di negara Indonesia berhubungan dibidang politik dan internasional sehingga memiliki fokus utama dalam pembelajaran hubungan internasional disuatu negara (Maulida, dan Kusumawardhana, 2020).

Saat ini Indonesia sedang menghadapi permasalahan dibidang politik secara internasional sehingga dapat menangani permasalahan dengan benar (Maryani & Nasution, 2019). Pada perspektif realisme berhubungan dengan sistem politik secara global dijadikan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan hubungan internasional berupa kedaulatan dan otonom digunakan untuk menentukan organisasi sehingga memberikan

kebebasan dalam menyetujui kerjasama dan keputusan disuatu organisasi (Ambari, 2019). Indonesia memiliki ambisi dalam memerankan hal besar pada kawasan di Asia Pasifik (Ambari, 2019). Salah satu indikator sebagai kunci keberhasilan dalam menerapkan kebijakan luar negeri dengan memberikan kekuatan terhadap maritime. negara (Maulida, dan Kusumawardhana, 2020).

Terdapat konsep ini memiliki peran penting dijadikan sebagai doktrin bagi strategi yang baru dalam memberikan cerminan sebagai kekuatan dibidang maritime sehingga berpengaruh terhadap diplomasi (Riska, 2017). Pemerintahan Joko Widodo memiliki tujuan sebagai pusat kegiatan maritim sehingga perlu kebijakan dalam memberikan sanksi secara tegas berkaitan dengan illegal fishing (Sutiyono dan Haryanto, 2017). Dampak secara berkelanjutan sehingga terdapat kemunculan secara nasional pada lingkup ASEAN yang masih sensitif dengan kemunculan penerapa kebijakan ini. Negara indonesia memiliki potensi yang besar karena memiliki aspek penting dalam menetapkan kebijakan terhadap aturan yang tepat berkaitan dengan IUU Fishing dan kebijakan pemerintah indonesia dalam menangani permasalahan tersebut (Riska, 2017).

Terdapat kebijakan ini memiliki tujuan memberikan efek jera bagi kapa lasing yang akan menangkap ikan secara illegal di wilayah perairan negara indonesia sehingga dapat mencapai kedaulatan pada perairan (Zainul, 2019). Permasalahan yang harus dihadapi adalah illegal fishing, dimana menangkap ikan tanpa izin dan pemalsuan kapal asing hingga masuk ke perairan di indonesia (Sutiyono dan Haryanto, 2017). Pemerintah indonesia dapat menerapkan kebijakan penenggelaman kapal sehingga dapat membentuk perilaku yang rasional pada

pemerintah indonesia dengan menjaga keamanan pada wilayahnya (Zainul, 2019).

Kebijakan penenggelaman kapal asing sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah indonesia sehingga dapat mencapai kepentingan nasional untuk menjaga keamanan pada wilayah sehingga dapat memberikan kekuatan (Putranto., et., al., 2019). Berdasarkan teori realisme, analisis dari kapa lasing dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di indonesia dapat memberikan kejelasan illegal dan mengimplementasikan kebijakan berkaitan dengan penenggelaman kapal asing (Merem et al., 2019).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian pada sebuah obyek secara langsung. Fokus penelitian mengenai analisis kebijakan luar negeri terhadap illegal fishing berdasarkan perspektif realisme. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi literatur review melalui buku, jurnal, artikel, dan website yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dapat dilakukan yaitu pertama, reduksi data dengan mengumpulkan data dan mengelompokan topik penelitian. Kedua, penyajian data dengan mengelompokan informasi. Ketiga, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Kebijakan Luar Negeri tentang Illegal Fishing

Negara indonesia berada di wilayah perairan laut china selatan dimana pada wilayah perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun dalam

memberantas illegal fishing terdapat kelemahan yaitu Pertama, sistem dalam melakukan pengawasan dimana jumlah kapal pada pengawasan perikanan jauh dari angka kebutuhan sehingga menyebabkan minimnya jumlah anggaran yang digunakan dalam mengoperasikan pengawasan. Kedua, kelemahan dalam menindaklanjuti hukum pada setiap adanya pelanggaran dalam memberantas illegal fishing (Chen et al., 2023).

Pemberantasan illegal fishing membutuhkan militan dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan dengan memberantas illegal fishing yang ada di ZEE Laut Cina Selatan. Kemanan yang ada pada kawasan Laut China Selatan yang dapat mengganggu wilayah teritorial dan kelestarian yang ada di laut china selatan. Sehingga memberikan ketegasan melalui state state practices di LCS dimulai dengan dimulai adanya aktivitas penangkapan ikan hingga militer hingga memasuki pada wilayah perairan ZEE Kepulauan Natuna dimana negara indonesia berada di wilayah ZEE Indonesia yang disebut dengan Illegal Fishing (Quimbayo et al., 2022).

Hubungan bilateral antara indonesia dengan Vietnam telah ada sejak tahun 2013 sehingga telah membawa pada suatu kemitraan yang dilakukan secara strategis. Presiden Joko Widodo akan menghadapi berbagai banyak masalah salah satunya illegal fishing yang terjadi pada perairan negara indonesia sehingga menjadi bentrok dan pada insiden domain maritime. Selain itu, illegal fishing pada negara vietnam menjadi lebih menarik digunakan pada jalur laut yang dilakukan secara internasional

sebagai suatu kepentingan pada berbagai negara yang ada di wilayah Negara ASEAN, dimana memiliki kekayaan laut dan perairan yang sangat melimpah pada jalur perdagangan (Belhabib & Billon, 2020).

Permasalahan illegal fishing yang terjadi pada negara indonesia dengan Vietnam semakin meningkat karena adanya kebijakan dalam penangkapan dan penenggelaman kapal bagi pencuri ikan asing yang ada di indonesia salah satunya kapal penangkapan ikan yang berasal dari Vietnam. Kebijakan tersebut menyebabkan pihak pemerintah Vietnam merasa bahwa negara indonesia tidak memiliki landasan sikap kemanusiaan. Negara vietnam juga mengakui bahwa indonesia tidak menghargai adanya kemitraan secara strategis selama dijalani pada kedua negara tersebut. Potensi pada sumber daya perikanan yang paling besar berada di perairan pada pengawasan yang cukup lemah pada perbatasan diakibatkan pada kapasitas dan sarana dalam mengawasi armada pada kapal patroli di negara indonesia, kebutuhan ikan yang ada di luar negeri dan belum terlaksana pada kerjasama bilateral secara maksimal ada di negara tetangga terutama dalam menangani illegal fishing, setelah mendorong terjadinya kegiatan illegal fishing yang ada di perairan indonesia sehingga perlu dibangun dan dikembangkan dalam melakukan penanganan pada kegiatan illegal (Tickler et al., 2019).

Tindakan penenggelaman kapal tersebut dapat memperburuk hubungan antara negara indonesia dengan negara vietnam pada pasca kebijakan "Sink The

Vessels” yang berlangsung dalam sistem kompleks dengan keterkaitan pada jangka panjang dan mengesampingkan kekuatan dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Adanya aksi kepentingan menjadi sebuah harapan pada suatu peran, sistem sebuah symbol yang digunakan untuk menentukan kepentingan nasional. Pada sistem simbol yang dilakukan secara praktis dapat memberikan pengaruh terhadap sistem secara kompleks, memberikan kontribusi sebagai agen sosial dalam merespon segala kondisi dan situasi terkait permasalahan yang ada di negara ASEAN(Donlan et al., 2020).

Negara indonesia dengan Vietnam tidak dapat menggunakan berbagai kekuatan yang dilakukan secara intramural sebagai norma yang digunakan dalam membantu untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi berbagai macam ancaman antara satu dengan yang lainnya. Kedua negara mengalami peningkatan, dan menghadapi berbagai macam persepsi ancaman untuk meningkatkan dilema keamanan sehingga dapat menyebabkan berbagai macam hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Secara konstruktif telah meyakini bahwa hasil proses interaksi yang terjadi dalam membentuk suatu kepentingan pada pihak-pihak tertentu(Mackay et al., 2020).

Secara deskriptif mengenai hubungan antara indonesia dengan Vietnam yang dilakukan secara sepihak dalam mengatasi berbagai kepentingan yang terjadi di negara vietan dan indonesia, perilaku suatu harapan peran, dan symbol yang berkaitan(Yunitasari, 2020). Oleh karena itu, adanya konstruktif sebagai makna yang

dilakukan secara subyektif untuk mengembangkan pemahaman bersama, identitas dan suatu kepentingan sebagai aspek non material yang dapat mempengaruhi pengelolaan terhadap kelolosan dilema keamanan. Kebijakan peneggelaman kapal terhadap illegal fishing bagi pencuri ikan yang ada di wilayah perairan negara indonesia sebagai tindakan yang perlu dilakukan oleh negara yang seenaknya menangkap ikan di wilayah perairan negara indonesia tanpa izin(Asrori et al., 2021). Berdasarkan perspektif realisme pada illegal fishing dapat mengimplementasikan kegiatan peneggelaman kapal. Undang-Undang ini dapat terjadi secara menyeluruh pada aktivitas perikanan tanpa melihat lokasi, sasaran, jenis dan alat-alat untuk menangkap ikan dengan ukuran eksploitasi yang baik dengan jumlah kecil dan besar pada suatu wilayah yuridiksi secara nasional dan internasional(Mahmudah, 2022).

#### **b. Illegal Fishing Perspektif Realisme**

Illegal fishing adalah kegiatan dalam menangkap tanpa izin dari negara tersebut. Tindakan ini dilakukan oleh kapal asing sehingga dengan mengelola ikan di kawasan yang ada pada suatu negara dengan anggota organisasi dan kelompok dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar dark organisasi atau kelompok sebagai standar dalam menentukan hukum internasional yang berlaku. Tindakan ini bertentangan dengan aturan serta hukum yang berlaku pada suatu negara dengan kegiatan dalam illegal fishing. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan aturan nasional disuatu

negara, namun perairan di negara indonesia yang dimanipulasi dengan aturan nasional pada suatu negara. Perairan di indonesia sering terjadi aktivitas atau kegiatan illegal fishing sebagai penangkapan ikan tanpa izin dengan memanipulasi surat izin yang palsu menggunakan alat-alat untuk menangkap ikan yang sesuai dengan jenis spesies ikan dengan menangkap ikan sesuai jenis spesies ikan yang tidak tertera izin(Juned et al., 2019).

Kegiatan ini dilakukan pada kapal asing yang digunakan untuk menangkap ikan. Tindakan ini tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kerugian dibidang ekonomi. Berdasarkan perspektif realisme, sifat dasar manusia adalah egois sehingga demi mewujudkan dan tercapai kepentingannya. Kapal asing terlihat egois karena ingin memperoleh keuntungan. Hal ini dapat terlihat dari penangkapan ikan tanpa izin dan tidak bertanggung jawab. Adanya eksploitasi pada sumber daya ikan di perairan indonesia membawa kepada negara asalnya yang mementingkan tanpa memikirkan kerugian pada negaranya.

Implementasi kebijakan dalam penenggalaman kapal asing sesuai dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kebijakan dalam menenggalaman kapal pencuri ikan sebagai tindakan dan upaya untuk bertindak terhadap pidana perikanan yang memusnahkan barang bukti berupa kapal ikan. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan memberikan peringatan secara tegas pada kapal asing tanpa izin di wilayah perairan indonesia. Kebijakan ini dinilai cukup efektif karena terdapat shock therapy pada kapal-kapal asing kepada setiap pelaku

pencurian asing di wilayah perairan bagi negara indonesia(Speed et al., 2019).

Tidak hanya itu penerapan kebijakan dalam mengambil kehormatan dan martabat bangsa indonesia atas kedaulatan yang ada di kawasannya (Haryanto & Setiyono 2017). Kebijakan yang digunakan dalam penenggelaman kapa lasing dapat diterapkan bagi pemerintah negara indonesia dalam mengatasi illegal fishing. Berdasarkan realisme dapat membentuk tindakan rasional pada suatu negara dengan power dan kekuatan yang dimilikinya sehingga dapat mencapai kepentingan. Kepentingan nasional di negara indonesia berkaitan dengan keamanan nasional pada wilayah keamanan perairan. Fokus yang paling utama dapat menitikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional. Penerapan kebijakan nasional dengan penenggelaman kapa lasing yang mencuri ikan sebagai bentuk usaha dan upaya dilakukannya pihak pemerintah sehingga dapat menjaga dan mempertahankan wilayahnya. Tindakan pencurian ikan dilakukan dikapal-kapal asing dengan memberikan ancaman bagi negara indonesia sehingga membuat rugi.

Selain itu kebijakan penenggelaman kapal asing bagi pihak pemerintah sesuai dengan realisme yang ditunjukan bahwa negara dijadikan faktor yang paling penting bagi pihak pemerintah yang paling dominan. Kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan menjadi bentuk dari wilayah indonesia yang mencuri ikannya. Kerugian ini mengakibatkan tindakan kerugian ini sebagai tindakan illegal fishing pada kapal asing pada masyarakat. Ilegal fishing dilakukan bagi

kapal yang memberikan ancaman pada masyarakat. Pemerintah Indonesia memberikan kepentingan atas suatu wilayah perairan bagi kapal-kapal asing pencuri ikan yang telah mengeluarkan kebijakan dalam penenggelaman kapal asing. Penerapan kebijakan pada negara ini berperan memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat. Peran negara dapat menjaga keamanan secara nasional atas kebijakan penenggelaman kapal asing. Sehingga membuat kerugian dan perlu adanya kebijakan penenggelaman kapal asing bagi wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Kebijakan ini dinilai efektif memberikan dampak atas kebijakan yang dinilai efektif memberikan dampak kepada kapal asing pencurian ikan. Sehingga kebijakan ini dapat diatasi dengan potensi sumber daya laut sebagai sumber devisa negara yang wajib dipertahankan.

#### IV. KESIMPULAN

Illegal fishing pada negara Vietnam menjadi lebih menarik digunakan pada jalur laut yang dilakukan secara internasional sebagai suatu kepentingan pada berbagai negara yang ada di wilayah Negara ASEAN, dimana memiliki kekayaan laut dan perairan yang sangat melimpah pada jalur perdagangan. Tindakan ini bertentangan dengan aturan serta hukum yang berlaku pada suatu negara dengan kegiatan dalam illegal fishing. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan aturan nasional di suatu negara, namun perairan di negara Indonesia yang dimanipulasi dengan aturan nasional pada suatu negara. Realisme adalah perspektif hubungan internasional yang berkaitan dengan isu keamanan nasional dan

keberlangsungan pada suatu kehidupan negara. Perspektif ini memberikan pandangan mengenai sifat dasar manusia pada suatu kehidupan. Perspektif ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang egois dan individualisme untuk mencapai kepentingan nasional. Negara dalam melakukan tindakan secara rasional demi mencapai kepentingan terhadap kekuatan yang dimilikinya. Realisme adalah faktor yang paling penting sebagai pelindung dan menjaga keamanan. Sistem internasional berkaitan dengan perspektif anarki dan kekuatan menjadi lebih tinggi bagi penyelenggaraan negara demi mencapai perdamaian dan kestabilan demi menyeimbangkan kekuasaan berupa konsep *balance of power*. Realisme sebagai perspektif yang klasik dalam memberikan penjelasan mengenai fenomena yang kontemporer sehingga berkaitan dengan kebijakan dalam menenggelamkan kapal asing milik pemerintah Indonesia.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M. (2019, May 14). Penenggelaman kapal pencuri ikan jalan keluar terbaik bagi Indonesia. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2019/05/14/penenggelaman-kapal-pencuri-ikan-jalan-keluar-terbaik-bagi-indonesia/>
- Asrori, F., Jati, I. K., & Fitriyono, R. A. (2021). Kajian Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. Gema Keadilan. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/12634>
- Belhabib, D., & Billon, P. Le. (2020). Illegal fishing as a trans-national crime. *Frontiers in Marine Science*.

- <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00162>
- Chen, X., Xu, Q., & Li, L. (2023). Illegal, unreported, and unregulated fishing governance in disputed maritime areas: Reflections on the international legal obligations of states. *Fishes*. <https://www.mdpi.com/2410-3888/8/1/36>
- Donlan, C. J., Wilcox, C., Luque, G. M., & Gelcich, S. (2020). Estimating illegal fishing from enforcement officers. *Scientific Reports*. <https://www.nature.com/articles/s41598-020-69311-5>
- Dugis, V. (2018). Teori hubungan internasional: Perspektif-perspektif klasik. Airlangga University Press.
- Elnizar, E. (2017). Begini penjelasan hukum atas penenggelaman kapal terlibat illegal fishing. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-hukum-atas-penenggelaman-kapal-terlibat-illegal-fishing-lt59f149581edd7>
- Juned, M., Samhudi, G. R., & Lasim, R. A. (2019). The Impact Indonesia's Sinking of Illegal Fishing Ships on Major Southeast Asia Countries. *International Journal of Multicultural ...* <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/673>
- Kantaprawira, R., Bainus, A., & Kusumawardhana, I. (2018). The unbreakable relations between Indonesia and Vietnam under the "Sink the Vessels" policy: A complex system approach. *Journal of ASEAN Studies*, 6(2), 155-178.
- Mackay, M., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. (2020). The intersection between illegal fishing, crimes at sea, and social well-being. *Frontiers in Marine Science*. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.589000>
- Mahmudah, N. (2022). *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. [books.google.com](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mGFzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=illegal+fishing&ots=Mm2SwKIp5U&sig=NCzPjIK4weXfmwgiQbPJudSsNHc). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mGFzEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=illegal+fishing&ots=Mm2SwKIp5U&sig=NCzPjIK4weXfmwgiQbPJudSsNHc>
- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*. [https://lp2m.um naw.ac.id/file\\_data/artikel/10.%20REKONSEPSI%20MODEL%20PEMBERANTASAN.pdf](https://lp2m.um naw.ac.id/file_data/artikel/10.%20REKONSEPSI%20MODEL%20PEMBERANTASAN.pdf)
- Maulida, T., & Kusumawardhana, I. (2020). Analisis respon Vietnam dalam menghadapi kebijakan illegal fishing Indonesia di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna. *Insignia Journal of International Relations*, 7(2), 154–173.
- Merem, E. C., Twumasi, Y., Wesley, J., & ... (2019). Analyzing the tragedy of illegal fishing on the West African coastal region. ... *Journal of Food ...* [https://www.researchgate.net/profile/Jahshua-Washington/publication/332327658\\_Analyzing\\_the\\_Tragedy\\_of\\_Illegal\\_Fishing\\_on\\_the\\_West\\_African\\_Coastal\\_Region/links/5d1c2f75458515c11c0cbe21/](https://www.researchgate.net/profile/Jahshua-Washington/publication/332327658_Analyzing_the_Tragedy_of_Illegal_Fishing_on_the_West_African_Coastal_Region/links/5d1c2f75458515c11c0cbe21/)

- Analyzing-the-Tragedy-of-Illegal-Fishing-on-the-West-African-Coastal-Region.pdf?origin=journalDetail&\_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9
- Putranto, G. N. D., Zid, M., & Miarsyah, M. (2019). Konflik batas maritim, illegal fishing, dan upaya penegakan di wilayah laut Natuna antara Indonesia dan China. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 9(2), 185-193.
- Quimbayo, J. P., Silva, F. C., Barreto, C. R., Pavone, C. B., & ... (2022). The COVID-19 pandemic has altered illegal fishing activities inside and outside a marine protected area. *Current Biology*. [https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822\(22\)00989-7](https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00989-7)
- Riska, E. (2017). Diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan illegal oleh nelayan China di zee perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(2), 1-15.
- Speed, C. W., Rees, M. J., Cure, K., Vaughan, B., & ... (2019). Protection from illegal fishing and shark recovery restructures mesopredatory fish communities on a coral reef. *Ecology and ...*. <https://doi.org/10.1002/ece3.5575>
- Sutiyono, J., & Haryanto. (2017). Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing oleh pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Law Reform*, 13(1), 70-85.
- Tickler, D. M., Carlisle, A. B., Chapple, T. K., Curnick, D. J., & ... (2019). Potential detection of illegal fishing by passive acoustic telemetry. *Animal ...*. <https://doi.org/10.1186/s40317-019-0163-9>
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of ... *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23551>
- Zainul. (2019). Kebijakan pemberantasan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Cina Selatan tahun 2017. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(64), 1-40.